

**IMPLIKASI PROGRAM GREEN GROWTH POLICY PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar pada Departemen Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

Oleh:

RHIN KHAIRINA RAHMAT

NIM. E 061181317

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLIKASI PROGRAM GREEN GROWTH POLICY
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

N A M A : RHIN KHAIRINA RAHMAT

N I M : E061181317

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

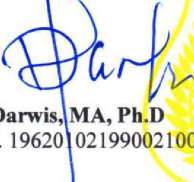
Makassar, 8 Juni 2022




Mengetahui :

Pembimbing I,

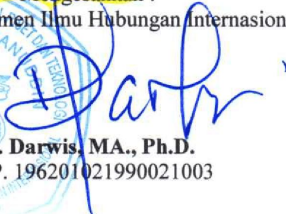
Pembimbing II,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLIKASI PROGRAM GREEN GROWTH POLICY
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

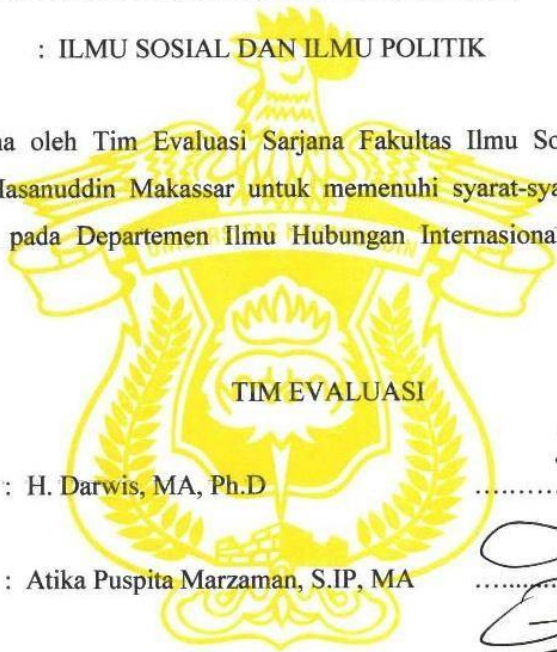
N A M A : RHIN KHAIRINA RAHMAT

N I M : E061181317

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 25 Mei 2022.



Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Four handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the text, each on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. H. Darwis, 2. Atika Puspita Marzaman, 3. Agussalim, and 4. Aswin Baharuddin. The signature for Bama Andika Putra is not clearly visible.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rhin Khairina Rahmat
NIM : E061181317
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Implikasi Program Green Growth Policy Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Rhin Khairina Rahmat

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhin Khairina Rahmat
NIM : E061181317
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Ilmiah

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implikasi Program Green Growth Policy Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar Pada
tanggal : 16 Mei 2022

Yang menyatakan,

(Rhin Khairina Rahmat)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur tiada henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan segala berkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dan junjungan menuju sebaik-baiknya kebaikan. Skripsi ini merupakan bentuk penghargaan penulis sebagai penutup studi pada tingkat Strata 1 disamping bentuk pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana untuk Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

Penulis juga menghargai setiap arahan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Olehnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak- pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini:

1. Kedua orang tua penulis, Rahmat Muhammad dan Indrayani Kasman atas setiap doa, kepercayaan, keyakinan, serta dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D atas bimbingan serta dukungannya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi sekaligus selaku pembimbing I bagi penulis.
4. Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing II yang telah memberikan kepercayaan dan bimbingan, serta motivasi bagi penulis untuk setiap kesempatan dalam berkarya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
5. Seluruh jajaran dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus kepada Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Kak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Kak H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR, Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA., Pak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Pak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.,

serta segenap dosen pengampuh mata kuliah yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Termasuk jajaran staf akademik Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas kontribusinya selama studi hingga penyelesaian skripsi penulis.

6. Ibu Taty tersayang atas semua doa-doa. Serta Bunda Dr. Indrayanti, S.Sos., M.Si. atas segala pantauan, pengertian, dan panutan berkarya serta semangat dalam menyerap ilmu selama masa studi hingga titik terakhir penyelesaian skripsi ini.
7. Adinda Ridho Firdaus Rahmat, sedarah seperjuangan penyelesaian studi serta atas usaha dan keyakinan bagi penulis.
8. Saudara saudari yang selalu mendukung penuh segala suka duka penulis selama masa studi, mulai dari Amela Ayunda Dewantari, Alfira Zakiah Rahman, Mifta Nur Fadilah, Puti Hilma, adinda Syarifah Trya, AuliaFarida, Glenis Diva, dan Farah Dhita. Termasuk warna warni dari Nadhilah Humairah, Nurol Fadhilah, Qanitah Taufiqah, Syahrial Murtedzadan Zul Ainun.
9. Teman-teman seperjuangan Student Volunteer HI, Prisma FISIP Unhas dan D'B3 Voice atas kebersamaan dan dedikasinya selama masa studi.
10. Saudari partner seperjuangan penulis, Astrid Risa Miranti dan Aulia Nurfadila. Termasuk saudari Husna, Wiwi, Rina, Suci Lestari, Lutfania, Nurnaningsih, Suci Dwi dan Elsa.
11. Saudara sepaham penulis sejak awal masa studi mulai dari Munif, Putu Tirta, Indra dan Ibnu. Termasuk Zaim, Ryan, Shafwan, Aan, dan Syahrin.
12. Reforma, atas kebersamaannya menjunjung almamater merah.
13. Kontribusi seluruh pihak yang belum disebutkan di atas, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for tring to do more right than*

wrong. I wanna thank me for being me at all times. For loving me, all times.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Olehnya, penulis menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran dari seluruh pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semoga Allah SWT senantiasa bersama dan memberikan kebaikan pada semua pihak yang berkontribusi selama masa studi hingga akhir pengerjaan skripsi ini.

Makassar, 4 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by the letters 'KH' and a decorative flourish.

Rhin Khairina Rahmat

PERSEMBAHAN

Salam, selamat mencari-cari

Referensi ini disusun oleh penulis yang percaya

Yang pasang akan surut

Yang tenggelam kan terbit

Yang jatuh akan bangkit

Paparan data dan fakta sesekali berhenti

Bingung mau apa dan bagaimana

Titik-titik hilangnya motivasi

Karena pelik, reda oleh peluk penuh Rahmat serta keIndahan-Nya

Tapi, tidak apa-apa

Semua ini manusiawi

Selalu ada ruang maaf bagi diri yang hilang arah

Pada akhirnya, referensi ini disusun oleh penulis yang kembali percaya diri

Silakan merujuk referensi ini sesuai porsi

Semoga apa yang dicari dapat terpenuhi

Semoga Ridho Allah menyertai

Kalau belum, ayo! Jangan berhenti

Sekian, salam dan semangat meneliti

Makassar, 26 Maret 2022

Rhin Khairina Rahmat

ABSTRAK

Rhin Khairina Rahmat, E061181317. **"IMPLIKASI PROGRAM GREEN GROWTH POLICY PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA"** yang disusun oleh Rhin Khairina Rahmat (E061181317) di bawah bimbingan **Bapak H. Darwis, MA, Ph.D** selaku pembimbing I dan **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam ajuan gagasan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut berkaitan dengan kompleksitas isu yang mampu diselesaikan melalui optimalisasi proses pembangunan berkelanjutan. Olehnya, Indonesia mendukung proses tersebut dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup melalui gagasan *green growth policy* (GGP) yang merupakan sebuah bentuk perekonomian yang kuat, tetap ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Implementasi GGP di Indonesia dilaksanakan dibawah tanggungjawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Penerapan GGP memberikan implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data yang disusun dalam bentuk bahasa. Peneliti menganalisis GGP dengan menggunakan klasifikasi konsep rezim internasional menurut Krasner.

Melalui konsep tersebut, peneliti melihat bahwa implikasi penerapan *green growth policy* terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. dijalankan berdasarkan prosedur pengambilan keputusan (*decision-making procedures*) yang berlaku berdasarkan teori rezim internasional. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Krasner yang menyatakan bahwa prosedur dan program dalam rezim internasional meliputi mekanisme, monitoring, sanksi-sanksi yang menjadi faktor dalam menilai kuat atau lemahnya peluang penerapan rezim dalam suatu negara. Faktor pendukung dan penghambat penerapan GGP di Indonesia. Faktor pendukung tersebut meliputi energi, manufaktur, konektivitas, sumber daya alam terbarukan, dan pasar baru berbasis modal alam. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Krasner yang menyatakan bahwa rezim internasional melibatkan interaksi antar aktor dari spesifik isu atau masalah yang bertemu dan sepakat untuk menjalankan prinsip, norma, aturan dan cara-cara demi mencapai kepentingan bersama.

Kata Kunci: *Green Growth*, Pembangunan Berkelanjutan, Rezim Internasional

ABSTRACT

Rhin Khairina Rahmat, E061181317. **"IMPLICATIONS OF THE UNITED NATIONS' GREEN GROWTH POLICY PROGRAM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA"** under the supervision of **Mr. H. Darwis, MA, Ph.D** as supervisor I and **Mr. Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as supervisor II of the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

Indonesia is one of the countries that actively contribute to the proposal of the Sustainable Development Goals (SDGs). This relates to the complexity of issues that can be resolved by optimizing the sustainable development process. Therefore, Indonesia supports this process by prioritizing environmental sustainability through the idea of a green growth policy (GGP), which is a form of a strong economy, that remains environmentally friendly, and socially inclusive. The implementation of GGP in Indonesia is carried out under the responsibility of the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS). The implementation of GGP has implications for sustainable development in Indonesia. This study uses qualitative research methods by processing and analyzing data compiled in the form of language. Researchers analyzed the GGP by using the classification of the concept of international regime according to Krasner.

Through this concept, the researcher sees the implications of implementing a green growth policy for sustainable development in Indonesia. carried out based on decision-making procedures that apply based on international regime theory. This is by Krasner's idea which states that procedures and programs in international regimes include mechanisms, monitoring, and sanctions which are factors in assessing the strength or weakness of the opportunities for implementing the regime in a country. Factors supporting and inhibiting the implementation of GGP in Indonesia. These supporting factors include energy, manufacturing, connectivity, renewable natural resources, and new markets based on natural capital. This is by Krasner's idea which states that international regimes involve interactions between actors from specific issues or problems who meet and agree to implement principles, norms, rules, and methods to achieve common interests.

Keywords: *Green Growth, Sustainable Development, International Regime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pembangunan Berkelanjutan.....	16
B. Green Growth Policy	22
BAB III PROGRAM GREEN GROWTH POLICY PBB DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA	27
A. Sejarah Perkembangan Gagasan Green Growth Policy Secara Global.....	27
B. Green Growth Policy di Indonesia	33

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM GREEN GROWTH POLICY PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA	41
A. Penerapan Green Growth Policy di Indonesia	43
B. Implikasi Penerapan Green Growth Policy terhadap Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	55
C. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Green Growth Policy di Indonesia.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 (GGGI, 2020)	24
Gambar 2. (Sumber : Kementrian PPN/Bappenas)	36
Gambar 3 (SDGs, 2021).....	73

DAFTAR TABEL

Table 1. (Sumber : GGGI Indonesia).....	38
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang aktif berkontribusi dalam ajuan gagasan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Hal tersebut berhubungan dengan banyaknya isu global yang juga terjadi di Indonesia. Diantaranya isu pembangunan sosial, hukum dan tata kelola, ekonomi dan lingkungan. Kompleksitas isu tersebut berkaitan dengan upaya optimalisasi proses pembangunan berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan (UN SDGs, 2015). Kelestarian lingkungan merupakan salah satu upaya pembangunan berkelanjutan yang berdampak pada kompleksitas isu secara keseluruhan.

Perhatian terhadap kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dimulaipasca pembangunan dunia yang berdampak pada kualitas lingkungan secara global. Kemiskinan, ekonomi, pembangunan dan pertumbuhan penduduk berujung pada *global warming* yang menyebabkan perubahan iklim secara global (Priyanta, 2010). Permasalahan serupa dihadapi di Indonesia melalui laju pertumbuhan penduduk yang tidak teratur dan berdampak pada permasalahan lingkungan. Kebutuhan laju pertumbuhan penduduk yang berusaha diatasi melalui industrialisasi berimbas pada penurunan kualitas hidup manusia melalui isu pembangunan dan lingkungan (BPS Indonesia, 2020).

Melihat masalah tersebut, dunia internasional mulai membangun komitmen bersama dalam upaya kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Komitmen tersebut diselenggarakan melalui kerjasama internasional serta konferensi di bidang lingkungan seperti Konferensi Stockholm tahun 1972 yang menghasilkan resolusi berupa pembentukan *United Nations Environment Programme* (UNEP), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992, KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) tahun 2002 di Johannesburg, KTT Pemanasan Global di Bali tahun 2007, serta Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Rio+20 tahun 2012. Agenda tersebut membahas mengenai prioritas pembangunan berkelanjutan. Maka, Indonesia turut serta dalam menanggulangi masalah tersebut.

Indonesia mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan melalui gagasan *green growth*. *Green Growth* atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sebuah bentuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetap ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial.

Green Growth mengandalkan gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Isu *green growth* menjadi solusi dari berbagai masalah seperti ekosistem hutan, penurunan kapasitas penyerapan karbon, kualitas air, mengkatalisasi erosi tanah, serta limbah produksi produk dan keanekaragaman hayati sebagai sebuah masalah lingkungan bersama di berbagai negara yang tertinggi di dunia.

Isu *green growth* berkembang menjadi kepentingan bagi sejumlah negara-negara. Isu ini kemudian disah kan melalui perjanjian internasional di Rio+20 Summit Brazil 2012 (Rio+20). Terdapat tiga tujuan dari konferensi ini, mulai dari memperbaharui komitmen politik untuk pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi antara kemajuan dan kesenjangan dari upaya implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi munculnya tantangan baru (Leggett & Carter, 2012). Komitmen yang dihasilkan merujuk pada dua tema utama, yaitu *the green economy* atau ekonomi hijau dan *the institutional framework for sustainable development* (IFSD).

Indonesia juga merupakan salah satu dari 193 negara anggota PBB yang berpartisipasi dalam Rio+20. *Green Growth* berkembang menjadi sebuah ide transisi menuju ekonomi hijau dibawah pengelolaan komunitas global yaitu *The Green Growth Knowledge Partnership* (GGKP). Komunitas ini dibentuk oleh *The Global Green Growth Institute* (GGGI), sebuah organisasi global hasil perkembangan dari Rio+12. GGGI bertujuan untuk merintis model pertumbuhan ekonomi baru di negara-negara berkembang yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, peluang terbukanya lapangan kerja, bentuk sosial serta kelestarian lingkungan dan sumber daya. Pembentukan GGGI didukung oleh 20 negara anggota pendiri, termasuk Indonesia.

Kebijakan konsep Rio+ di Indonesia terelasi setelah diterima oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menghasilkan organisasi berupa GGGI, dilihat sebagai peluang perkembangan

ekonomi oleh WEF atau *World Economic Forum*, dan mulai diimplementasikan oleh sejumlah negara anggota G20, termasuk Indonesia (Blaxekj, 2012).

Implementasi mengenai perwujudan perjanjian tersebut diinternalisasi melalui program Rencana Jangka Menengah Pemerintah Nasional (RPJMN) 2014-2019. RPJMN berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi alam dan penanganan perubahan iklim (Rany et al., 2020). Proses tersebut dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui program pembangunan ramah lingkungan yang dikenal dengan *Green Growth*.

Green growth mulai berkembang dan diadopsi oleh sejumlah negara dalam bentuk penerapan kebijakan atau *green growth policy*. Sejumlah negara mulai menerapkan *green growth policy*, seperti Costa Rica yang membuat undang-undang pada tahun 1996 mengenai pajak bahan bakar dan air demi mencegah deforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati (OECD, 2012).

Sri Lanka memanfaatkan potensi produksi pakaian yang ramah lingkungan dengan cara membuat Pabrik EcoCentre demi mengurangi 80% emisi karbon, 46% hemat energi 58% pengurangan air konsumsi. Efek penerapan tersebut ikut mempengaruhi aspek politik dan perekonomian negara. Kedua kondisi tersebut menggambarkan bahwa penerapan *green growth policy* menguntungkan sekaligus dibutuhkan oleh sejumlah negara (GGGI, 2018).

Penerapan mengembangkan *green growth policy* secara regional juga aktif dikembangkan di sejumlah kawasan. Salah satunya *The Urban Green Growth in Dynamic Asia* yang menawarkan peluang dan tindakan untuk beralih ke model pertumbuhan yang lebih hijau. Proyek ini melibatkan studi kasus terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, termasuk di Indonesia (OECD, 2019).

Potensi pertumbuhan lingkungan hijau di Indonesia terdata sebagai negara tertinggi kelima setelah India, Afrika Selatan, Islandia dan China dengan perubahan pembangunan wilayah sebesar 68,7% (*Green Growth Indicators*, 2017). Data tersebut merupakan hasil dari indikator terbaru yang dirilis dalam *Green Growth Indicators 2017* dan mencatat kemajuan capaian oleh negara-negara anggota OECD dan G20 sejak tahun 1990 (Oglethorpe et al., 2009).

Negara-negara tersebut mulai dari China, Polandia, Kolombia, Portugal serta negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Data kemajuan tersebut menunjukkan bahwa negara yang telah disebutkan sebelumnya memiliki potensi percepatan teknologi lingkungan yang lebih besar (OECD, 2017).

Perubahan populasi di Indonesia juga meningkat sejak tahun 1990-2014 sekitar 41,5% (*Green Growth Indicators*, 2014). Sementara pemerataan inovasi lingkungan di Indonesia sejak tahun 2014-2016 hanya berkembang sebesar 9,42% (*Green Growth Indicators*, 2016). Maka, Indonesia punya potensi untuk mengembangkan inovasi tersebut melalui penerapan *green growth*.

Penerapan konsep *green growth* di Indonesia berkaitan dengan berkembangnya industrialisasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2019,

terdapat presentase pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (Badan Pusat Statistik, 2020). Posisi tersebut tercatat dalam *United Nations Statistics Division* bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dari 15 negara didunia dengan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB lebih dari 10% pada tahun 2016 (BPS Indonesia, 2016). Akan tetapi, terdapat dampak negatif terhadap lingkungan alam Indonesia dibalik peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Beberapa isu lingkungan, sumber daya alam, serta pemenuhan kualitas terhadap sumber daya manusia.

Isu tersebut merupakan akibat dari faktor penghambat dan pendukung penerapan *green growth* di Indonesia. OECD telah mengulas kajian penerapan *green growth* di Indonesia berupa hasil kinerja lingkungan mengenai aturan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan hijau dalam *the first Green Growth Policy Review*. Olehnya, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai proses transformasi serta implementasi *green growth* di Indonesia terhadap Rio+20.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Isu *green growth* merupakan salah satu solusi yang diimplementasi secara global untuk mengefektifkan sumber daya pada masing-masing negara. Penelitian ini fokus untuk mengkaji proses transformasi *Green Growth Policy* di Indonesia pasca Rio+20. Komitmen dalam Rio+20 merujuk pada dua tema utama, yaitu *the green economy* atau ekonomi hijau dan *the institutional framework for sustainable development* (IFSD).

Komitmen terhadap ekonomi hijau terkait pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan serta kerangka institusional untuk pembangunan berkelanjutan (IFSD) (Leggett & Carter, 2012). Penelitian ini akan dibatasi mengenai kebijakan komitmen terhadap ekonomi hijau terkait pembangunan berkelanjutan yang dikemas dalam penerapan *green growth*. *Green growth* yang menyangkut pada implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui batasan masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana penerapan Green Growth Policy di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi penerapan Green Growth Policy terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Green Growth Policy di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

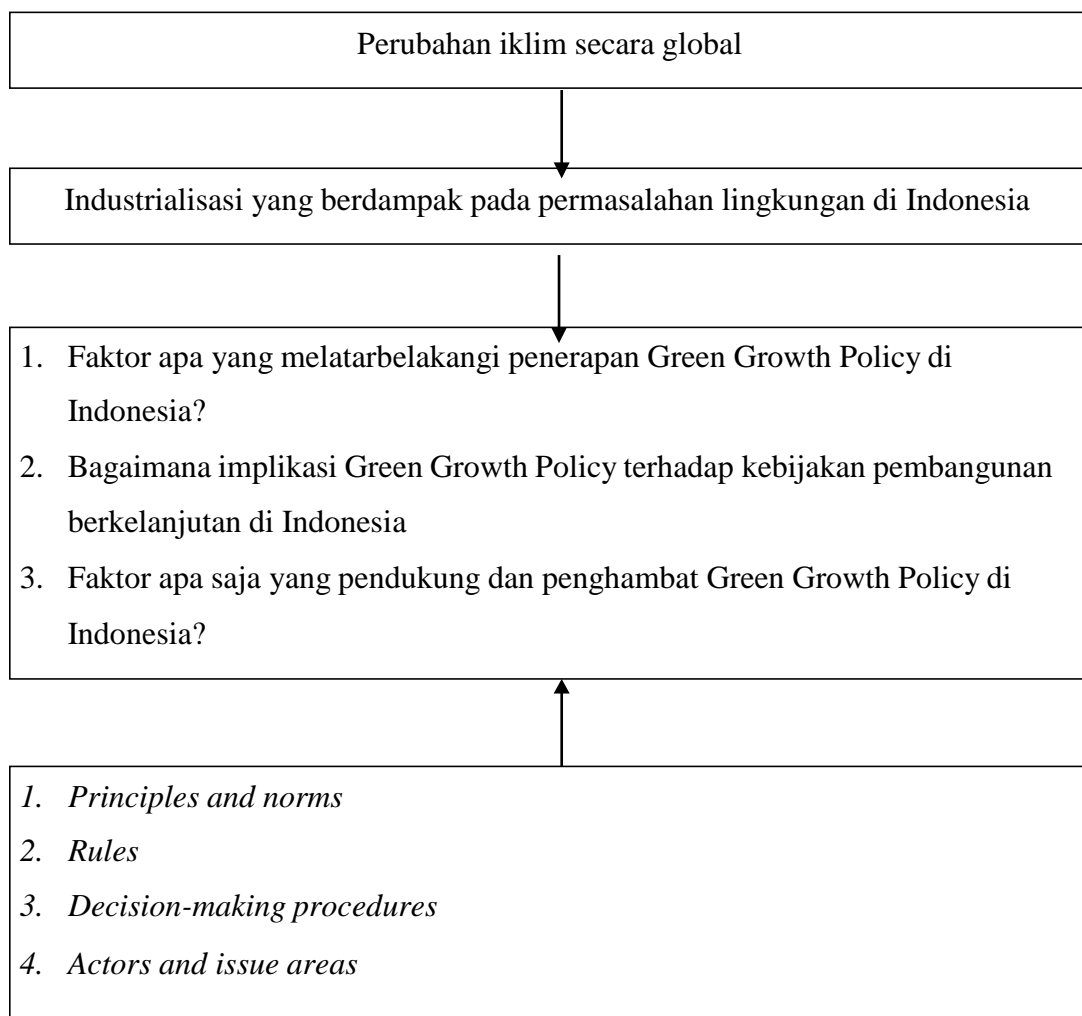
1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis proses penerapan Green Growth Policy di Indonesia
- b. Untuk menganalisis implikasi Green Growth Policy terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Green Growth Policy di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai faktor-faktor penerapan serta implikasi terhadap kebijakan Green Growth Policy di Indonesia.
- b. Bagi akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terkait faktor-faktor penerapan serta implikasi Green Growth Policy terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual



Rezim Internasional

Rezim internasional menjadi cikal bakal dari adanya kerjasama internasional. Rezim internasional terwujud sebagai kerangka kerjasama internasional untuk merumuskan kepentingan negara-negara dengan tujuan tertentu. Olehnya, rezim internasional mengikat perilaku negara berdasarkan kepentingan bersama. Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai “*implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relations.*” (Haggard & Simmons, 1987).

Seperangkat norma dan prinsip-prinsip dalam rezim internasional memiliki implikasi yang kuat terhadap stabilitas dan perubahan. Para aktor secepat terhadap kepatuhan yang disepakati bersama. Berjalannya rezim dapat mendukung berbagai lapisan sosial yang berbeda dalam hal pendistribusian sumber daya.

Melalui definisi tersebut, klasifikasi konsep rezim menurut Krasner yang diterapkan antar aktor dinilai berdasarkan prinsip dan norma, aturan, prosedur dalam pengambilan keputusan di mana harapan para aktor bertemu (O’Neill, 2009). Klasifikasi tersebut juga disebutkan dalam literatur *The Study of International Regimes* sekaligus sebagai ciri dalam rezim internasional (Levy et al., 1995).

1. Prinsip dan Norma (*Principles and norms*)

Krasner berpendapat bahwa gagasan dalam mengklasifikasi rezim dengan prinsip dan norma merupakan kekuatan struktural yang secara keseluruhan terkait dengan stabilitas hegemoni. Rezim internasional yang berorientasi

terhadap pasar bebas diharapkan berjalan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Krasner dalam hal ini juga mengemukakan bahwa rezim yang berorientasi pada negara dan memberikan hak otoritas secara nasional kecenderungan mampu mengurangi ketidaksetaraan dalam pendistribusian sumber daya antar negara, namun belum mampu mengurangi ketidaksetaraan secara domestik. Sementara, rezim yang memberikan hak milik kepada otoritas global memungkinkan pendistribusian sumber daya yang lebih merata baik antar negara maupun internal negara.

Pendapat Krasner didukung oleh John Ruggie yang berpendapat bahwa rezim internasional merupakan interpretasi multilateralisme yang menekankan prinsip dasar kerjasama (Levy et al., 1995). Multilateralisme dalam pendapat tersebut dijelaskan sebagai kebijakan yang disepakat bersama berdasarkan prinsip anti-diskriminasi yang berlaku secara general, prinsip tidak dapat dibagi, serta prinsip timbal balik yang menyebar sebagai satu kesatuan elemen dan konsekuensi bersama.

2. Aturan (*Rules*)

Krasner mencantumkan aturan sebagai aspek kedua setelah prinsip dan norma. Tujuan mencantumkan aturan dalam rezim internasional harus mengandung salah satu bentuk pernyataan yang melarang, mengharuskan, atau mengizinkan beberapa tindakan atau hasil agar dianggap sebagai aturan.

Pendapat Krasner selanjutnya didukung oleh Thomas Franck yang berpendapat bahwa aturan internasional memiliki daya tarik normatif menuju

bentuk kepatuhan dari negara anggota sejauh aturan tersebut sah (Levy et al., 1995). Terdapat empat karakteristik yang dapat meningkatkan legitimasi tersebut mulai dari ketegasan dan kejelasan, validasi anggota dalam institusi, koherensi internal dan hubungan vertikal antara aturan sebagai sistem dan hirarki. Selebihnya, rezim internasional digambarkan sebagai rezim yang kuat ketika memiliki aturan yang padat, spesifik dan mencakupi berbagai aktivitas (O'Neill, 2009).

3. Prosedur Pengambilan Keputusan (*Decision-making procedures*)

Krasner mencantumkan aturan prosedur dalam pengambilan keputusan sebagai aspek ketiga. Prosedur dan program dalam rezim internasional dijelaskan sebagai peluang dan kemungkinan dari kuat atau lemahnya suatu rezim. Hal tersebut meliputi mekanisme, monitoring, sanksi-sanksi dan resolusi dari penerapan prosedural dan program dalam suatu rezim (Levy et al., 1995).

4. Aktor dan Isu (*Actors and issue areas*)

Rezim internasional melibatkan interaksi antar aktor dari spesifik isu atau masalah yang dihadapi bersama. Krasner menilai interaksi aktor yang bertemu dan sepakat untuk menjalankan prinsip, norma, aturan dan cara-cara demi mencapai kepentingan bersama (O'Neill, 2009). Semakin banyak aktor, semakin sulit memprediksi keberhasilan atau konsekuensi suatu rezim. Setiap usaha antar aktor yang sepakat terhadap suatu rezim sudah terikat dalam prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkait didalamnya (Levy et al., 1995).

Melalui penjelasan dari masing-masing ciri dalam rezim internasional, terbukti bahwa agenda pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* atau SDGs merupakan bagian dari rezim internasional. SDGs merupakan salah satu penerapan rezim internasional dibawah naungan PBB yang terikat dalam norma, aturan, serta melibatkan aktor-aktor dengan sejumlah kepatuhan dan kesepakatan bersama dalam 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agenda tersebut dapat mengatur perilaku negara sebagai aktor terlibat yang juga sepakat untuk mengadopsi agenda tersebut sebagai acuan kebijakan yang berlaku dalam negara.

Berkembangnya masalah iklim dan globalisasi di sejumlah negara-negara di dunia merupakan sebuah fenomena perubahan yang meluas di berbagai sektor, termasuk industrialisasi. Perubahan tersebut juga berdampak pada kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Efektivitas penerapan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari rezim internasional kini didukung oleh konsep ekonomi hijau (*green economy*) yang juga mulai berkembang.

Pada KTT Rio tahun 2012 (Rio+20), isu *green economy* pada konteks pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu komitmen bersama. Konsep *green economy* mendukung UNEP dalam meluncurkan Green Economy Initiative atau GEI pada tahun 2008. *Green economy* didefinisikan sebagai “*one that results in improve human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities*” (UNEP, 2012).

Melalui definisi tersebut, *green economy* secara sederhana dapat dianggap sebagai suatu proses rangkaian ekonomi yang berkontribusi pada tiga dimensi

yaitu rendah karbon, efisiensi terhadap sumber daya dan inklusi sosial. Konsep *green economy* melalui pandangan OECD, World Bank dan GGGI menggunakan istilah *green growth* yang mirip dengan konsep *green economy* dalam cakupan implementasi yang sedikit berbeda. Merujuk pada laporan OECD, *green growth* didefinisikan sebagai “*fostering economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our being relies.*” (UNEP, 2012).

Melalui definisi tersebut, maka keduanya sama-sama berorientasi pada perkembangan ekonomi hijau. Adapun sisi *growth* atau pertumbuhan sebagai elemen kedua dari konsep tersebut. OECD juga mengemukakan bahwa *green growth* dipresentasikan pada tahun 2011 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global, industrialisasi, dan masalah ketahanan ekonomi pangan atas permintaan negara-negara anggota, juga sebagai kontribusi OECD terhadap proses Rio+20 (Kasztelan, 2017).

Konsep *green economy* menilai pencapaian *green growth* dan SDGs melalui aspek politik, sosial dan ekonomi. Aspek politik dapat membentuk strategi dan kebijakan dalam pengembangan teknologi hijau melalui peran negara, swasta, pengusaha dan instansi. Aspek sosial mengarah pada peran masyarakat atau individu sebagai *sustainable policy maker* dalam mencapai perubahan berkelanjutan. Sementara aspek ekonomi lebih pada pengembangan inovasi teknologi hijau yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, tulisan ini akan menganalisis kontribusi Indonesia sebagai aktor yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan

melalui penerapan *green growth* menggunakan teori rezim internasional menurut Krasner. Rumusan masalah pertama mengenai faktor yang melatarbelakangi penerapan *green growth* di Indonesia akan dianalisis dan meliputi sebagian besar klasifikasi menurut Krasner. Klasifikasi tersebut adalah prinsip, norma, aturan dan prosedur atau cara-cara. Penjelasan latar belakang faktor sekaligus mengembangkan proses transformasi *green growth policy* di Indonesia

Rumusan masalah kedua mengenai implikasi penerapan *green growth* terhadap pembangunan berkelanjutan akan dianalisis berdasarkan klasifikasi ketiga menurut Krasner yaitu prosedur atau cara pengambilan keputusan. Rumusan masalah ketiga mengenai faktor pendukung dan penghambat penerapan *green growth* di Indonesia akan dianalisis berdasarkan kategori aktor menurut Krasner. Hal tersebut berhubungan dengan perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan *green growth* melibatkan sejumlah aktor negara dan non-negara.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengolah dan menganalisis data dengan mengedepankan kualitas data yang disusun dalam bentuk bahasa. Tipe kualitatif dalam penelitian Ilmu Hubungan Internasional membahas mengenai fenomena dan aktor serta untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di dunia internasional (Bakry, 2016). Penelitian ini dianggap sesuai untuk menggunakan metode kualitatif berhubung peneliti akan

menelaah tentang transformasi *Green Growth Policy* serta implikasi terhadap penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis data sekunder. Peneliti memilih data yang bersumber dari jurnal, karya tulis ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini adalah buku, artikel, video, ataupun berita akurat yang terkait permasalahan dari implikasi penerapan *green growth* sebagai upaya penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data-data terkait melalui buku, jurnal, artikel, dokumen yang diperoleh melalui media *online* maupun *offline*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, data-data dari hipotesis peneliti, selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara menyesuaikan gambaran masalah terhadap data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argument yang tepat.

5. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus melalui hasil analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dimulai sejak terbitnya *The Brundtland Report, Our Common Future* oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Laporan ini mengutip definisi dari pembangunan berkelanjutan sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” (Keeble, 1988).

Definisi tersebut menegaskan bahwa konsep pembangunan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup saat ini, tanpa mengurangi upaya pemenuhan hidup dari generasi mendatang. PBB juga menilai konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan kemajuan ekonomi sekaligus melindungi aspek lingkungan hidup untuk jangka panjang. Konsep ini merupakan hasil dari berbagai masalah global seperti ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dan konsekuensi lingkungan berupa tempat tinggal makhluk hidup, eksploitasi dan keterbatasan sumber daya alam.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu dengan judul “*The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles*” yang diliris pada tahun 2015 oleh Rachel Emas. Penelitian ini menyatakan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kesetaraan antargenerasi. Kesetaraan tersebut mengakui skala berkelanjutan jangka panjang untuk memenuhi

kebutuhan generasi mendatang (Emas, 2013). Olehnya, tujuan keseluruhan dari pembangunan berkelanjutan adalah stabilitas ekonomi dan lingkungan jangka panjang melalui integrasi masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial di seluruh proses pengambilan keputusan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penerapan *green growth* terhadap konsep pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk yang mencakupi keseluruhan prinsip pada hukum lingkungan internasional. Apabila penelitian Emas memaparkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk kesetaraan antargenerasi. Maka, penelitian ini memaparkan konsep pembangunan berkelanjutan yang meliputi bentuk kesetaraan antargenerasi dan intragenerasi. Penelitian ini juga didukung oleh berlakunya prinsip hukum lingkungan secara global serta kesesuaian terhadap rezim internasional menurut Krasner.

Upaya stabilitas ekonomi dan lingkungan terkait pembangunan berkelanjutan dibahas secara berkala dalam beragam agenda konferensi selama beberapa dekade oleh negara anggota PBB. Sejumlah agenda inti terkait hal tersebut dimulainya konferensi Stockholm tahun 1972 yang memulai era modern kerja sama lingkungan global (O'Neil, 2009).

Konferensi Stockholm 1972 menyetujui *Declaration of Twenty-six* sekalipun tidak bersifat mengikat tapi mengacu pada nilai kontributif negara anggota, panduan prinsip-prinsip, rencana aksi serta menetapkan 109 rekomendasi untuk agenda internasional yang lebih spesifik (O'Neill, 2009). Pertemuan antar negara dalam konferensi ini juga menyerukan pentingnya kerja sama internasional

melalui menetapkan bersama prosedur untuk memenuhi tujuan kolektif, integrasi dan perjanjian lingkungan internasional.

Konferensi Stockholm menandai awal perdebatan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi (O'Neill, 2009). Perkembangan perdebatan tersebut kemudian berlanjut pada tahun 1992, dalam agenda the Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil atau KTT Rio 1992. Hasil konferensi tersebut menyatakan bahwa tujuan lingkungan dapat terwujud selaras dengan tujuan pembangunan. Hal tersebut berarti bahwa perlindungan lingkungan global tidak dapat tercapai apabila mengorbankan kemampuan atau sumber daya dari negara-negara berkembang atau mengorbankan generasi yang akan datang demi pemenuhantujuan pembangunan. Kekhawatiran tersebut menyerukan suara dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka normatif untuk semua bentuk politik lingkungan global, termasuk ekonomi global dan politik pembangunan, serta penyebab dari masalah lingkungan, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai laporan serta konferensi yang telah diadakan mulai dari laporan *Bruntland*, Agenda 21 yang diterbitkan pada KTT Rio 1992, hingga *Millennial Development Goals* atau tujuan pembangunan millennium yang ditetapkan PBB pada tahun 2000, telah banyak dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan, aktivis maupun sektor korporasi tertentu untuk membuat kerangka pembangunan.

Rencana pembangunan berkelanjutan kembali dibahas pada tahun 2012, dalam Rio+20 di Rio de Janeiro atau Rio+20 di Brasil. Konferensi ini mengadopsi

hasil dokumen *The Future We Want* yang merupakan kesepakatan bersama. Komitmen dalam Rio+20 merujuk pada dua tema utama, yaitu *the green economy* atau ekonomi hijau dan *the institutional framework for sustainable development* (IFSD). *The green growth economy* sebagai komitmen utama yang selanjutnya akan dibahas lebih spesifik dalam penerapan *green growth*.

Komitmen *the green growth economy* dalam Rio+20 sudah dijabarkan pada penelitian terdahulu yang berjudul “*Rio+20: The United Nations Conference on Sustainable Development*” yang dirilis pada tahun 2012 oleh Leggett dan Carter. Penelitian tersebut menjabarkan bahwa beberapa elemen pembangunan berkelanjutan pada KTT Rio 1992 seperti ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan elemen yang penting sebagai penunjang utama. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *green economy* sebagai persimpangan antara peningkatan ekonomi dan lingkungan namun mengesampingkan aspek sosial (Leggett & Carter, 2012).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dampak terhadap elemen pembangunan berkelanjutan. Penelitian terdahulu lebih general pada *green economy* dan resiko terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara penelitian ini menunjukkan sub detail pada *green economy*, yaitu penerapan *green growth*. Penerapan *green growth* pada pembangunan berkelanjutan dijelaskan melalui pilar yang menunjang aspek sosial dengan prospek kerja yang saling mendukung.

The Future We Want dalam Rio+20 berisi proses pengembangan konseptujuan pembangunan berkelanjutan untuk merumuskan langkah-langkah

pembangunan berkelanjutan yang lebih mendalam seperti program kerja, biaya pembangunan dan lainnya (UN, 2012). Pembangunan berkelanjutan menjadi rencana yang disepakati secara global, termasuk Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan serta melindungi lingkungan.

Hingga pada 25 September 2015, negara-negara sepakat untuk mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disebut SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Perkembangan agenda tersebut seiring dengan kebutuhan dan kompleksitas isu global. Hal tersebut juga sudah dipaparkan pada penelitian yang berjudul “*The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues*”. Penelitian yang dirilis oleh Klarin pada tahun 2018 ini menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan berkelanjutan telah mengalami transformasi dari berbagai fase. Pembangunan berkelanjutan ditunjang oleh partisipasi dari berbagai aktor. Konsep ini beradaptasi melalui isu-isu lingkungan global yang kompleks.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada proses transformasi dan adaptasi dari berbagai fase. Apabila penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang perkembangan pembangunan berkelanjutan pada berbagai fase, maka penelitian ini lebih fokus pada perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui *green growth*. Penelitian terdahulu tersebut masih berkesesuaian dengan penerapan SDGs hingga saat ini.

SDGs menetapkan sejumlah target pembangunan yang dihadapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Agenda 2030 tersebut berisi 17 poin tujuan serta 169 target SDGs. Poin tujuan tersebut diantaranya (UN SDGs, 2015):

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan kualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam negara dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif bagi semua level.
17. Memperkuat ukuran implementasi dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, 17 poin tujuan SDGs menjadi prinsip tujuan bersama bagi negara-negara anggota PBB untuk pencapaian pembangunan yang memadai, termasuk Indonesia.

B. *Green Growth Policy*

Green growth policy atau kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau sudah dimulai sejak usainya pelaksanaan Rio+20 Summit tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. Salah satu diantara dua tema utama dari hasil konferensi tersebut merujuk pada *the green economy* atau ekonomi hijau. Penerapan konsep ekonomi hijau kemudian menjadi sebuah ide transisi dalam penerapan *green growth policy*.

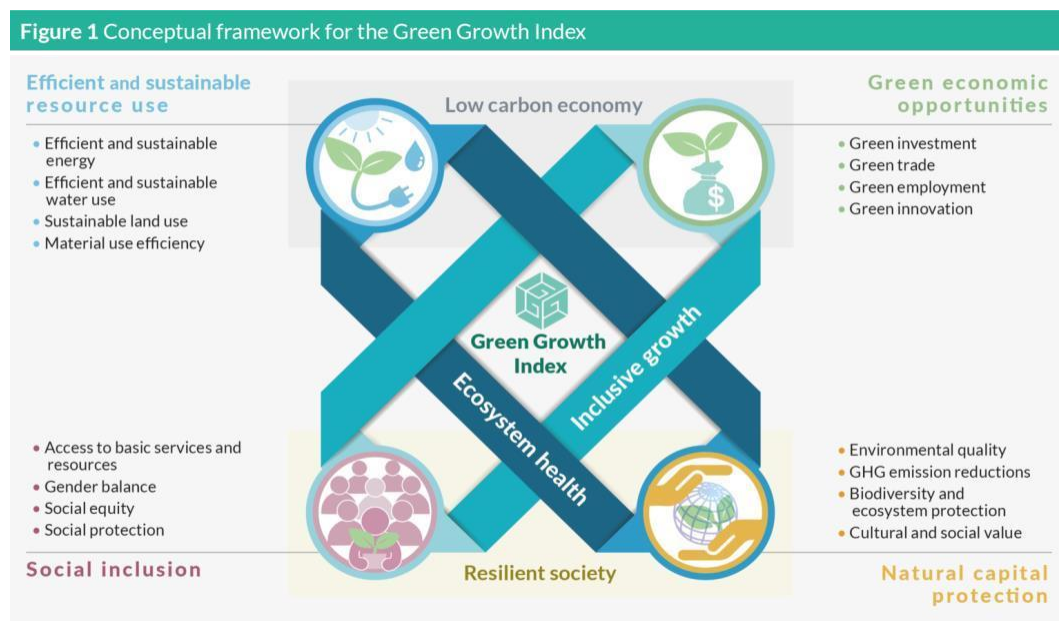
Perkembangan penerapan *green growth* merupakan hasil gabungan konsep dari OECD, UNEP, dan World Bank dalam sisi yang berbeda-beda dan masing-masing saling terelasi. Tujuan penerapan *green growth* berfokus pada kebijakan seperti penelitian dan pengembangan, investasi, pengembangan teknologi hijau serta infrastruktur (Borel-Saladin & Turok, 2013). Hal tersebut sesuai dengan tujuan *green growth* menurut OECD yaitu “...aims to foster economic growth and development, while ensuring that natural assets are used sustainably, and continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies..” (Kasztelan, 2017)

Ide konsep *green growth policy* dari *green economy* juga dirincikan oleh Armand Kasztelan dalam tulisannya yang berjudul “*Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse*”. Kasztelan memetakan model konsep *green growth policy*, *green economy* dan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu bentuk korelasi yang saling melengkapi karena memiliki sinergi yang mendukung satu sama lain. Tulisan tersebut juga mengemukakan penerapan *green growth* sebagai solusi bagi masalah ekonomi dan ekologi dengan menciptakan bentuk pertumbuhan baru.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pemetaan model konsep *green growth policy*. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya relasi antara *green economy*, *green growth* dan pembangunan berkelanjutan. Sementara penelitian ini menjelaskan relasi antara *green growth* dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan indeks *green growth* yang juga merupakan indeks yang digunakan secara global.

Perkembangan ide dan tujuan konsep *green growth policy* saat ini paling mendekati definisi menurut GGGI, 2012 (Kasztelan, 2017). Tulisan tersebut mengutip bahwa “...*new revolutionary development paradigm that sustains economic growth while at the same time ensuring climatic and environmental sustainability..*”. Menurut definisi tersebut, konsep *green growth policy* dapat menjadi paradigma pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan serta menopang pertumbuhan ekonomi negara yang menerapkannya.

Konsep *green growth policy* diterapkan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh *Green Growth Index* (GGI). GGI memiliki *draft framework* yang merujuk pada beberapa fase dari masing-masing negara anggotanya dan mencantumkan empat dimensi yang saling berkaitan dalam perkembangan *green growth* (GGGI, 2020).



Gambar 1. Draft *framework* dari GGI yang diterapkan di Indonesia

(Sumber: GGGI, 2020)

Berdasarkan *draft framework* tersebut, terdapat empat sektor yang meliputi indeks dari penerapan *green growth policy*. Sektor tersebut meliputi efisiensi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya (*efficient and sustainable resource use*), peluang ekonomi hijau (*green economic opportunities*), inklusi sosial (*social inclusion*), dan perlindungan modal alam (*natural capital protection*). Konsep *green growth policy* diterapkan dan saling mempengaruhi unsur-unsur perbaikan bagi masyarakat dan penyusunan agenda tujuan berkelanjutan.

Perkembangan penerapan *green growth* telah dioptimalisasi diberbagai kawasan global. Salah satunya kawasan Asia yang beberapa negara diantaranya memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerapan *green growth*. Hal tersebut juga dijelaskan pada tulisan berjudul “*Going Green Why Asia is moving toward a green model of economic growth*”. Tulisan tersebut dirilis oleh Asia Development Bank (ADB) pada tahun 2012 yang memuat tulisan-tulisan mengenai *green economy* dan *green growth* sebagai bagian dari pencapaian dalam skala global (Development Asia, 2012).

Penerapan tersebut juga dioptimalisasi di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai optimalisasi SDGs. Salah satu penelitian yang mendukung hal tersebut dijelaskan pada tulisan “*Indonesia’s New SDGs Agenda for Green Growth – Emphasis in the Energy Sector*”. Tulisan yang dirilis melalui Internasional Journal of Energy Economics and Policy pada tahun 2021 tersebut mengemukakan tentang pemberdayaan *green growth* yang berpengaruh terhadap sektor energi (Suparjo et al., 2021).

Perbedaan dari kedua penelitian terdahulu terhadap penelitian ini terletak pada studi kasus. Penelitian ini menegaskan penerapan *green growth* sebagaibagian dari pencapaian dalam skala nasional di Indonesia. Apabila tulisan ADB menjelaskan alasan perkembangan ekonomi hijau di Asia, maka tulisan ini menganalisis faktor-faktor perkembangan ekonomi hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara penelitian lainnya yang mengulas tentang pembaharuan agenda SDGs yang mendukung *green growth* pada sektor energi memiliki perbedaan yang berbanding terbalik. Penelitian ini mengkaji penerapan *green growth* yang mendukung agenda SDGs. Ulasan pada penelitian ini mencakupi sektor energi dan sektor-sektor lainnya berdasarkan draft *framework* GGI.

Hingga saat ini, konsep *green growth policy* telah berkembang menjadi organisasi bernama Green Growth Global Index atau GGGI. GGGI juga merilis agenda laporan tahunan bagi negara-negara yang menerapkan *green growth policy*, sasaran serta indikator yang relevan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam 17 poin SDGs.